

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Program K2I (kemiskinan, kebodohan dan Infrastruktur) yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Riau, merupakan terobosan baru yang merupakan cikal bakal pemabngunan di Riau dalam rangka mengejar ketertinggalan Riau yang hampir pada semua bagian. Mengingat kantong-kantong kemiskinan di Riau yang sebagian besar berada di desa, maka perlu dibentuk suatu program yang benar-benar mampu menyentuh masyarakat desa yang disebut dengan Program Pemberdayaan Desa (PPD).<sup>22</sup>

UED-SP merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikri (LKM) yang ada di desa lokasi PPD. Program ini merupakan bantuan teknis terhadap masyarakat desa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan ekonomi yang sifatnya dana bergulir.

#### A. Gambaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri

Dana simpan pinjam BUMKam Tuah Negeri berasal dari anggaran APBD Kabupaten Siak, dana ini awalnya berjumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dana ini merupakan dana bergulir. Dengan adanya dana ini sangat menunjang perekonomian masyarakat. Dari sisi keuangan, pembukuan dan segala kegiatan dilakukan secara transparan, dan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, dalam AD/ART sebagai pedoman dan aturan dalam menjalankan program UED-SP ini, didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang harus dipatuhi bersama oleh pengelola ataupun pemanfaat.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UED-SP PS Barat diresmikan menjadi BUMDes Tuah Negeri dibentuk pada tanggal 15 Juni 2007 dengan SK Kepala Desa Kampung Pinang Sebatang Barat No.035/SK/PSB/X/2007.<sup>23</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Tuah Negeri merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya oleh pemerintah dan masyarakat desa, jadi masyarakat peminjam perlu ditanamkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri adalah milik kita bersama yang perlu dipelihara, dijaga keberadaanya sehingga penguatan lembaga keuangan akan tercapai. Tingkat kejujuran dari pengelola maupun masyarakat peminjam merupakan hal terpenting untuk menuju Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri yang sehat dan berkembang.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak diberi nama Badan Usaha Milik Desa “Tuah Negeri” sesuai dengan pasal 1 ayat 1 anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Tuah Negeri Kampung Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak yang berbunyi : “Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Tuah Negeri”. BUMDes Tuah Negeri berkedudukan dan berkantor di Kampung Pinang Sebatang Barat.

Kemudian adapun maksud Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri adalah sebagaimana yang tercantum dalam bab II Pasal II Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tuah Negeri Kampung Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak yang berbunyi:

<sup>23</sup> Azman (Direktur BUMDes Tuah Negeri), *Wawancara*, November 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa”.

Kemudian adapun tujuan Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri adalah sebagaimana yang tercantum dalam bab II Pasal III Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri Kampung Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak yang berbunyi: “Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Tuah Negeri adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja”.

Kemudian adapun bidang usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri adalah sebagaimana yang tercantum dalam bab III Pasal IV Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri Kampung Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak yang berbunyi: “Bidang Usaha Badan Usaha Milik Desa Tuah Negeri adalah:

- a. Pelayanan Jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa, dan lain-lain yang sejenis;
- b. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan dan argo bisnis;
- d. Industri kecil dan kerajinan rakyat;

- e. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat”.

## **B. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri Kampung Pinang Sebatang Barat**

### **Visi**

Visi adalah cita-cita yang ingin dicapai lembaga atau organisasi, dimana segala usaha dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkannya. Dimana visi disusun dalam sebuah proses dengan kehadiran semua unsur lembaga atau organisasi masyarakat dan akan dibawa kemana lembaga atau organisasi tersebut. Sedangkan manfaat visi tersebut adalah menjadi tujuan akhir dari proses kelembagaan, menjadi arahan dari suatu proses, serta menjadi pedoman dan pengawal proses kelembagaan.

Maka yang menjadi Visi Badan Usaha Milik Desa Tuah Negeri yaitu :

“memajukan ekonomi mikro warga Kmapung Pinang Sebatang Barat ”.<sup>24</sup>

### **Misi**

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya dalam mewujudkan visi, dalam hal Perumusan Misi ini dilakukan dalam rangka menjabarkan Visi, bersifat umum, belum didukung data, tapi bisa dikerjakan secara operasional, kemudian Misi lebih bersifat aplikatif dimana terdapat penafsiran yang diberikan oleh lembaga terhadap Visi yang ingin dicapainya.

Adapun Misi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri yaitu :

---

<sup>24</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat”.<sup>25</sup>

**C. Tujuan dan Fungsi BUMDes**

a. Tujuan

BUMDes dibentuk dengan tujuan :<sup>26</sup>

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa
2. Memajukan perekonomian Desa
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan aset-aset Desa yang ada

b. Fungsi

BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan cara :<sup>27</sup>

1. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada.
2. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber
3. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi Desa dan mengurangi pengangguran
4. Membantu pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Desanya
5. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Desa

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Perda Kabupaten Siak No. 18 tahun 2007

<sup>27</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sasaran

Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran :

1. Terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif.
2. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa, sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan serta sehat dan berdaya saing tinggi.

d. Strategi

1. Menciptakan sistem penjaminan (*guarantee financial system*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
2. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha;
3. Menata dan memperkuat tenaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Langkah-langkah strategi tersebut diimplementasikan melalui kebijakan, yaitu dengan menyediakan bantuan teknis dan pendampingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sebutan Fasilitator Pendampingan BUMDes Kabupaten Siak melalui Keputusan Bupati yang di danai dari APBD Kabupaten Siak. Hal ini mengingat bahwa kunci keberhasilan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes terletak pada berfungsinya kerjasama dan kemitraan antar pelaku usaha BUMDes secara adil dan profesional, melalui pengawasan dan pendampingan.

e. Prinsip BUMDes

BUMDes merupakan satu kesatuan lembaga perekonomian yang ada di desa yang terus dipelihara oleh masyarakat dan bukan merupakan lembaga perbankan formal sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta tidak termasuk dalam sistem perkoperasian sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan demikian BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada *benefit oriented* (mengejar keuntungan) dan sosial. Untuk mendukung tercapainya tujuan BUMDes, maka pelaksanaannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip dibawah ini :

1. Transparansi

Seluruh operasional kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*accountable*).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi

Pengertian partisipasi adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan BUMDes mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan.

3. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.

4. Akuntabilitas

Bahwa setiap transaksi keuangan maupun administrasi dapat dilakukan tertib dan mencatat semua kejadian tersebut dan dapat dipertanggung jawabkan.

**D. Permodalan BUMDes**

Modal BUMDes diperoleh dari :<sup>28</sup>

1. Modal sendiri yang diusahakan oleh pemerintah Desa yakni modal yang berasal dari kekayaan Desa atau aset Desa merupakan aset yang dipisahkan pembukuannya
2. Tabungan masyarakat
3. Bantuan, yang berasal dari pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten
4. Sumbangan pihak lain yang sah

---

<sup>28</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

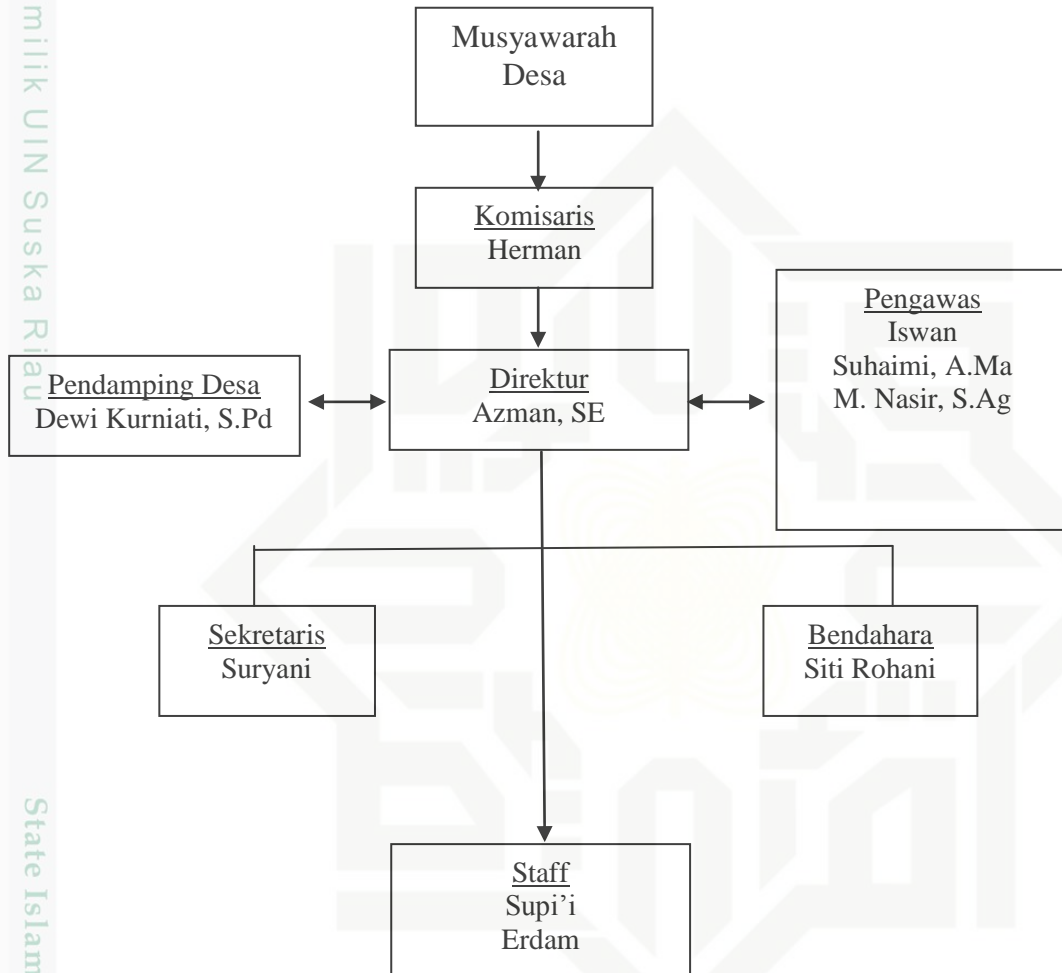
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pinjaman, yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan dan lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan
6. Modal penyertaan dalam bentuk penyertaan modal masyarakat Desa, pihak lain, atau kejasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan

**E. Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tuah Negeri Kampung Pinang Sebatang Barat**

Dalam sebuah lembaga susunan kepengurusan sangatlah penting dalam menunjang program kerja yang sudah disusun. Susunan kepengurusan membantu dan mempermudah setiap pengurus dalam berkoordinasi. Dapat dilihat pada struktur kepemimpinan dibawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**  
**Tuah Negeri Kampung Pinang Sebatang Barat**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.